BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 13 /KPTS/09/2023

TENTANG

TIM KOORDINASI MONITORING DAN EVALUASI KELEMBAGAAN, TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penataan kelembagaan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Barat, perlu dilaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi kelembagaan, tugas dan fungsi perangkat daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Kelembagaan, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Tahun 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 14 Tahun 2021;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Kelembagaan, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Tahun 2023 dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud diktum kesatu bertugas:
a. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi kelembagaan, tugas dan fungsi perangkat daerah;
b. menganalisis data hasil monitoring dan evaluasi kelembagaan, tugas dan fungsi perangkat daerah; dan
c. menyampaikan laporan hasil monitoring dan evaluasi kepada Gubernur dan Menteri Dalam Negeri.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2023.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 2 Januari 2023

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

NUKMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SARJAK
NIP. 19761020 200501 1 008

Tembusan:
1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
3. Kepala Bagian Hukum Setdakab. Lampung Barat;
4. Masing-masing Anggota Tim.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 13 /KPTS/09/2023
TANGGAL : 2 Januari 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI MONITORING DAN EVALUASI KELEMBAGAAN, TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

1.	Penganggung Jawab	:	Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung
2.	Ketua	:	Asisten Administrasi Umum
3.	Wakil Ketua	:	Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Barat
4.	Sekretaris	:	Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Organisasi
5.	Anggota	:	1. 1 (satu) orang Unsur Inspektorat; 2. 1 (satu) orang Unsur Bappeda; 3. 1 (satu) orang Unsur BPKD; 4. 1 (satu) orang Unsur Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM; 5. 1 (satu) Orang Unsur Bagian Hukum; 6. Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Organisasi 7. 6 (enam) orang Pelaksana Bagian Organisasi

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SARJAK
NIP. 19761020 200501 1 008

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

NUKMAN